Vol. 10, No. 3, 2024, pp. 215-231
DOI: https://doi.org/10.29210/020244068

Contents lists available at Journal IICET

JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)
ISSN: 2502-8103 (Print) ISSN: 2477-8524 (Electronic)

Journal homepage: https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi

Studi patologis terhadap pelaksanaan program warung penekanan inflasi di kota Madiun

Rizky Dwi Akbar Aprilian, Rutiana Dwi Wahyunengseh, Asal Wahyuni Erlin Mulyadi
Master of public administration, Faculty of Social and Political Sciences, Sebelas Maret University, Surakarta, Central Java 57126, Indonesia

Article Info

Article history:

Received May 28th, 2024
Revised Jul 16th, 2024
Accepted Aug 03rd, 2024

Keyword:

Program warung tekan inflasi,
Potensi patologis,
Implementasi kebijakan subsidi,
Disrupsi ekonomi

ABSTRACT

Pembatasan aktivitas sosial yang diterapkan selama pandemi Covid-19, meskipun berdampak positif terhadap kesehatan masyarakat, turut menyebabkan disrupsi ekonomi yang signifikan. Pemerintah berupaya menekan inflasi melalui program subsidi seperti Warung Tekan Inflasi. Namun, penelitian menunjukkan adanya gap antara pencapaian dan proses pelaksanaannya, menandakan adanya potensi patologis dalam implementasi. Penelitian ini menganalisis potensi patologis dalam implementasi Program Warung Tekan Inflasi di Kota Madiun dan menganalisis langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Kota Madiun dalam menangani potensi patologis tersebut untuk mengurangi risiko ketidaktepatan sasaran kebijakan. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus yang bertujuan untuk menganalisis potensi patologis dalam implementasi program Warung Tekan Inflasi. Penelitian ini dilakukan di Kota Madiun. Dalam penelitian ini, penentuan informan dilakukan melalui teknik purposive sampling dengan menerapkan kriteria-kriteria yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Subjek penelitian yaitu Pemerintah Kota Madiun yang memiliki otoritas dalam pelaksanaan program Warung Tekan Inflasi; Dinas Perdagangan Kota Madiun Kota Madiun sejumlah 3 (tiga) orang; Bagian Perekonomian dan Kesra Kota Madiun sejumlah 2 (dua) orang; 12 (dua belas) orang dari sektor tradisional; 1 (satu) orang dari Perumda Aneka Usaha; 1 (satu) orang dari Bulog Madiun. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif. Peneliti mengidentifikasi potensi patologis dalam Program Warung Tekan Inflasi Kota Madiun, seperti penjualan barang sembako subsidi di atas HET dan pembelian ulang untuk dijual kembali. Pemerintah merespons dengan menerbitkan aturan resmi, memperkuat pengawasan pedagang, menerapkan sistem pengaduan, dan menetapkan batasan jumlah pembelian serta prosedur evaluasi rekapitulasi penjualan. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman terhadap potensi patologis dalam implementasi kebijakan subsidi.

© 2024 The Authors. Published by IICET.
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0)

Corresponding Author:

Rizky Dwi Akbar Aprilian,
Sebelas Maret University
Email: rizkydwiakbara@gmail.com

Pendahuluan

Pada masa pandemic Covid-19 dilakukan pembatasan berbagai aktivitas yang bersifat social (Masters et al., 2020). Pembatasan aktivitas social tersebut memiliki dampak yang baik karena adanya penurunan kasus Covid-19 yang cukup signifikan, walaupun memiliki dampak yang sebaliknya pada sektor ekonomi di seluruh dunia

(Atalan, 2020), mencakup adanya penurunan pada pembuatan, penjualan, serta pembelian di pasar dunia (Hasan et al., 2023). Adanya kebijakan dilarang bepergian jauh, lock-down, serta pengurangan pegawai pada perusahaan menjadikan penyebab hambatan bagi sektor bisnis, serta rantai pasokan dunia sehingga terjadinya disrupsi pasokan (Choudhury et al., 2022). Hal ini dikarenakan kurangnya pengiriman barang sedangkan permintaan barang yang tetap tinggi, sehingga harga jual menjadi melonjak (Venny & Asriati, 2022). Adanya persaingan dalam mendapatkan barang yang turut menyebabkan inflasi di seluruh dunia seperti yang dikatakan World Bank, 2023 (Fadilla & Purnamasari, 2021). Keadaan ekonomi dunia menjadikan adanya perseteruan perekonomian di Indonesia yang menandai bahwa Indonesia turut mengalami ancaman resesi pandemi Covid-19 (Vanani & Suselo, 2021).

Lahirnya berbagai peraturan yang dikeluarkan pemerintah turut serta dalam menekan terjadinya inflasi (Pahlevi, 2017). Pada kebijakan ini pemerintah pusat memberikan arahan pada pemerintah daerah untuk selalu menjamin ketersediaan barang serta dapat menjaga konsumsi masyarakat dengan adanya berbagai subsidi bahan-bahan primer (Soen et al., 2022). Adanya implementasi dari aturan ini dapat membantu masyarakat dalam melakukan perubahan (Raghunandan, 2022). Subsidi yang dilakukan bisa diberikan pada beberapa sektor yang memenuhi syarat dan memiliki dampak pada inflasi yang terjadi, seperti halnya kebutuhan pokok masyarakat (Widodo & Dahiri, 2016). Studi terdahulu menyampaikan jika terjadinya kenaikan BBM turut memberikan dampak seperti tingginya angka kemiskinan (Dartanto, 2013; Izzati et al., 2023) dan terjadinya kenaikan inflasi yang cukup tajam (Izzati et al., 2023). Adanya dampak dari kenaikan BBM sudah mulai terasa, termasuk di Kota Madiun. Di lihat dengan adanya inflasi tahun kalender (ytd), terjadi peningkatan signifikan inflasi (ytd) di Kota Madiun pada tahun 2022.

Aturan untuk menekan terjadinya inflasi terus dilakukan pemerintah Kota Madiun salah satunya dengan adanya Warung Tekan Inflasi dengan kebijakan Wali Kota Madiun Nomor 50 Tahun 2022 mengenai Pedoman Penyelenggaraan Subsidi Harga Barang Kebutuhan Pokok yang kemudian diubah menjadi Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2023 mengenai Pedoman Penyelenggaraan Subsidi Barang Kebutuhan Pokok. Program Warung Tekan Inflasi diimplementasikan mulai 1 Juli 2022 di Sembilan kecamatan di Kota Madiun. Kebijakan ini mulai dilakukan pada sektor pasar tradisional serta kewilayahan. Adanya Warung Tekan Inflasi pada pasar tradisional dilakukan dengan adanya kolaborasi antara pemerintah dengan penjual kebutuhabn pokok di pasar tradisional. Adapun enam pasar yang dijadikan sebagai daerah dilakukannya Warung Tekan Inflasi dengan barang yang disubsidi seperti minyak, telur, dan berbagai jenis bawang dan cabai. Kemudian, pada sektor kewilayahan dilakukan pada Sembilan kios di semua kecamatan yang ada di Kota Madiun dengan menjual berbagai barang yang berasal dari produsen seperti beras bulog. Hal ini dikelola oleh Dinas Perdagangan.

Meskipun kondisi telah pasca pandemi pada tahun 2022 dan inflasi stabil, Warung Tekan Inflasi di Madiun tetap diperlukan. Warung ini membantu menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok secara lokal, melindungi masyarakat dari fluktuasi harga yang mungkin terjadi di pasar nasional. Ini juga mempromosikan kesadaran akan pentingnya pengendalian inflasi secara berkelanjutan di tingkat daerah, yang mendukung stabilitas ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat. Lebih dari setahun berlalu telah dilakukannya program Warung Tekan Inflasi, walaupun dilapangan terjadi kesenjangan antara hasil dan prosesnya. Data inflasi tahunan (ytd) dari BPS Kota Madiun mencatat tingkat inflasi Kota Madiun pada tahun 2022 yaitu sebesar 5,80% (ytd). Finansial yang besar untuk mencapai tujuan yang masih rendah pada program Warung Tekan Inflasi memperlihatkan bahwa adanya ketidakefisienan pada implementasi program Warung Tekan Inflasi. Sehingga memperlihatnya adanya potensi patologis yang terjadi.

Patologis ini mengacu pada peraturan yang berpedoman pada berbagai hasil akhir yang tidak baik yang bahkan berindikasi pada hasil yang merugikan (Yudiaris, 2015). Sehingg patologis ini diartikan sebagai adanya penyakit yang apabila pada konteks kebijakan memiliki kaitan dengan masalah birokrasi (Dasgupta & Kapur, 2020; Yolles, 2019). Sehingga patologis menjadikan adanya penyalahguaan anggaran oleh oknum yang menggunakannya untuk kepentingan pribadi (Prianto et al., 2021). Studi terdahulu mendapatkan jika selalu adanya indikasi kecurangan pada proses subsidi (Ai, 2019; Raghunandan, 2022; Ye & Deng, 2021). Pada prosesnya, pemerintah mempunya posisi tinggi sehingga berpotensi mendapatkan informasi yang tidak sesuai (Zhang et al., 2018). Proses implementasi program Warung Tekan Inflasi, penjual mempunyai kedudukan yang sesuai sebagai pihak penyambung antara pemerintah serta masyarakatnya yang membuat data yang didapattkan lebih didapatkan dari pihak lainnya.

Pada studi terdahulu juga dikatakan bahwa teori agensi dapat membantu dalam melakukan analisis pada indikasi terjadinya patologis (Yolles, 2019). Pada teori ini juga melalukan memberian wewenang pada agen, tetapi terjadi masalah sehingga mendapatkan kerugian dikarenakan adanya penyimpangan yang dilakukan agen. Pada penelitian yang dilakukan ini, pemberian wewenang pada program Warung Tekan Inflasi dilakukan berpedoman pada teori prinsipal-agent yang membuat pemerintah memiliki peran memberikan mandate pada

agen sehingga dapat melaksanakan aturan yang ada. Di lapangan, agen mendapatkan informasi lebih banyak karena berhubungan dengan pemerintah serta masyarakat. Sehingga terjadinya ketidakseimbangan informasi pemerintah serta agen yang berkaitan dengan pemerintah, dikarenakan agen memiliki jangkauan yang luas sehingga mendapatkan informasi yang lebih banyak juga. Kerugian pemerintah bisa terjadi kapanpun dikarenakan agen memanfaatkan informasi yang didapatkannya untuk kepentingan pribadi serta mengabaikan aturan yang telah disepakati sebelumnya (Hennessy & Wolf, 2018).

Studi yang dilakukan (Ye & Deng, 2021) memperlihatkan adanya Tindakan salah pemberian informasi yang dilakukan pedagang, hal ini membuat rugi pemerintah serta masyarakat. Sehingga perlunya analisis mendalam dengan membedakan kepentingan pemerintah serta pedagang yang membantu dalam melakukan kecurangn. Adanya kekuasaan membantu pedagang dalam melanggar kebijakan yang telah disepakati sebelumnya (Lupia, 2015). (Keban, 2019) menyatakan bahwa administrasi public didalamnya terdapat adanya dimensi strategi, seperti peraturan, organisasi, manajemen, sikap, lingkungan, serta akuntabilitas kinerja. Adapun penelitian yang dilakukan memiliki focus pada patologis dan penanganannya dalam Program Warung Tekan Inflasi. Analisis yang dilakukan turut memperhatikan kualitas, efektivitas, dan kapasitas kebijakan, serta mengikutsertakan masyarakat serta beberapa instansi yang memiliki hubungan. Penelitian ini menilai signifikansi dari substansi, lingkungan, dan tahapan dalam pengembangan program tersebut, juga seberapa efektifnya dalam memenuhi kebutuhan dasar penduduk Kota Madiun dengan biaya yang terjangkau. Peran pemerintah memiliki kepentingan besar dalam memastikan kesuksesan program ini tanpa terjadi pertentangan antara pihak yang memprakarsai dan yang melaksanakan.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam analisis patologis implementasi kebijakan dan menyediakan kerangka konseptual yang dapat diterapkan pada implementasi kebijakan pengendalian inflasi. Secara praktis, hasil penelitian ini akan memberikan manfaat bagi pihak Pemerintah dalam mengevaluasi implementasi Program Warung Tekan Inflasi. Penelitian lainnya dilakukan (Zafarullah & Haque, 2023) mendapatkan hasil bahwa adanya inikasi patologi dilakukan secara kualitatif dengan menganalisis alasan terjadinya money laundery di Bangladesh dengan tidak ada pencegahan sebelumnya, adapun penelitian ini juga menganalisis langkah mitigasi dan penanganan patologis dari pemerintah.

Penelitian tentang analisis potensi patologis dalam implementasi Program Warung Tekan Inflasi menampilkan kebaruan dalam dua aspek utama. Pertama, penelitian ini tidak hanya berfokus pada identifikasi potensi patologis, tetapi juga mencoba merumuskan langkah-langkah mitigasi dan penanganan yang diperlukan berdasarkan teori prinsipal-agensial. Wang dkk. (2019) juga mengusulkan model kebijakan subsidi baru sebagai solusi terhadap kecurangan, sementara penelitian ini lebih memfokuskan pada analisis langkah-langkah mitigasi dan penanganan potensi patologis tanpa mengganti program subsidi yang sudah berjalan. Meskipun demikian, program Warung Tekan Inflasi tetap dianggap bermanfaat dalam upaya menekan inflasi, namun membutuhkan penyempurnaan agar dapat mengatasi kerugian agensi. Pada penelitian ini juga mengaplikasikan teori prinsipal-agensial yang belum digunakan dalam penelitian sebelumnya. Teori ini merupakan kerangka kerja yang membantu memahami dinamika antara pemilik sumber daya (prinsipal) dan agen yang bertindak atas nama prinsipal. Dengan menerapkan teori ini dan mengfokuskan pada Program Warung Tekan Inflasi, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih rinci dan mendalam tentang potensi patologis dalam implementasi kebijakan tersebut, terutama dalam konteks pedagang.

Konflik antara prinsipal dan agen masih dapat dievaluasi dengan menerapkan strategi yang dapat mengurangi kerugian agensi. Sebagaimana yang disarankan oleh (Raghunandan, 2022), pengawasan yang ketat dan penegakan sanksi yang tegas dalam pelaksanaan subsidi dapat lebih efektif dalam mendorong perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan kebijakan (Yusmiati et al., 2023). Oleh karena itu, Program Warung Tekan Inflasi menjadi subjek penelitian yang penting karena penanganan inflasi telah menjadi isu nasional yang secara langsung memengaruhi daya beli masyarakat. Sehingga tujuan pada penelitian ini mengidentifikasi potensi patologis yang dapat menyebabkan kerugian agensi dalam Program Warung Tekan Inflasi dan; menganalisis langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Kota Madiun dalam menangani potensi patologis tersebut untuk mengurangi risiko ketidaktepatan sasaran kebijakan.

Metode

Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah sebuah studi kasus yang bertujuan untuk menyelidiki potensi patologis dalam pelaksanaan program Warung Tekan Inflasi. Peneliti akan melakukan analisis yang mendalam terhadap satu kasus spesifik, yaitu implementasi program Warung Tekan Inflasi di Madiun. Data akan dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk wawancara dengan pedagang, pemerintah, dan masyarakat yang menjadi sasaran subsidi, observasi

lapangan, serta analisis dokumen terkait. Kebijakan terkait program Warung Tekan Inflasi, petunjuk pelaksanaan program, laporan kegiatan, dan evaluasi program sebelumnya.

Pada penelitian studi kasus, peneliti mempunyai kemampuan dalam memperoleh sudut pandang yang beragam terhadap masalah yang diteliti. Dengan melibatkan pemerintah, pedagang, dan masyarakat yang terlibat dalam program Warung Tekan Inflasi, peneliti dapat mengumpulkan berbagai perspektif tentang potensi masalah yang mungkin muncul dalam pelaksanaan program serta mengidentifikasi potensi patologis yang dapat terjadi. Selain itu, peneliti akan menggunakan data dan informasi yang diperoleh dari situasi nyata di lapangan. Ini mencakup pengumpulan data langsung dari pelaksanaan program Warung Tekan Inflasi, seperti analisis dokumen, interaksi, dan wawancara. Dengan memeriksa konteks kehidupan nyata, studi kasus dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang potensi patologis dalam program Warung Tekan Inflasi.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Madiun karena kota ini memperoleh perhatian khusus dalam upaya menekan tingkat inflasi, meskipun tingkat inflasi di kota ini relatif lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Jawa Timur. Pemilihan lokasi ini menjadi penting karena bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan program Warung Tekan Inflasi, yang memiliki tujuan untuk mengurangi inflasi serta menjamin ketersediaan dan harga yang terjangkau bagi komoditas pangan.

Metode Penentuan Informan

Pada penelitian ini, pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang sesuai dengan Program Warung Tekan Inflasi. Subjek penelitian yaitu Pemerintah Kota Madiun yang memiliki otoritas dalam pelaksanaan program Warung Tekan Inflasi; Dinas Perdagangan Kota Madiun Kota Madiun sejumlah 3 (tiga) orang; Bagian Perekonomian dan Kesra Kota Madiun sejumlah 2 (dua) orang; 12 (dua belas) orang dari sektor tradisional; 1 (satu) orang dari Perumda Aneka Usaha; 1 (satu) orang dari Bulog Madiun. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif. Dengan melibatkan berbagai pihak ini, diharapkan penelitian dapat mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang identifikasi potensi patologis dalam implementasi program tersebut.

Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder untuk mengeksplorasi potensi patologis dalam pelaksanaan program Warung Tekan Inflasi serta merumuskan langkah-langkah mitigasi yang sesuai. Metode observasi digunakan untuk memantau secara langsung pelaksanaan program di lapangan dan mengidentifikasi potensi patologis di antara para pedagang, pemerintah, dan masyarakat. Wawancara dilakukan dengan pihak pemerintah dan pedagang yang terlibat untuk memahami pandangan mereka mengenai perbedaan kepentingan dan insentif yang mungkin menyebabkan terjadinya agency loss, serta langkah-langkah mitigasi yang sudah atau dapat dilakukan. Studi dokumentasi juga dilakukan dengan menganalisis kebijakan, panduan pelaksanaan, laporan kegiatan, dan evaluasi program sebelumnya untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam tentang program dan upaya mitigasi yang telah diterapkan sebelumnya.

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ini dibangun berdasarkan teori prinsipal-agen (*principal-agent theory*) yang dinyatakan oleh Lupia (2015). Instrumen penelitian ini secara detil ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 1. Instrumen Penelitian

Dimensi	Aspek	Indikator	Pihak yang dianalisis
Identifikasi potensi Patologis	Kepentingan	1) Tujuan dan preferensi pedagang dalam bergabung dengan program	Pemerintah, Pengawas, Pedagang
		2) Informasi dan asimetri informasi antara pemerintah dan pedagang dalam pelaksanaan program	Pemerintah, Pedagang, Masyarakat
		3) Pengukuran kinerja pedagang	Pemerintah, Pengawas, Pedagang
		4) Pengawasan bagi pedagang dalam program	Pemerintah, Pengawas, Pedagang
	Insentif	1) Struktur insentif bagi pedagang	Pemerintah, Pengawas, Pedagang
		2) Kejelasan perjanjian kontrak antara pemerintah dan pedagang mengenai pelaksanaan Program Wartek	Pemerintah, Pengawas, Pedagang

Dimensi	Aspek	Indikator	Pihak yang dianalisis
penanganan potensi patologis	Dukungan Hukum	1) Ketersediaan dan penegakan regulasi yang mengatur mengenai sanksi kecurangan.	Pemerintah, Pengawas, Pedagang
		2) Regulasi yang diperlukan untuk mengatasi *agency loss*	Pemerintah, Pengawas, Pedagang
	Subjek yang dapat dipercaya	1) Prosedur pelaporan masalah atau ketidakpatuhan	Pemerintah, Pengawas, Pedagang
		2) Respon terhadap *whistle-blowing*	Pemerintah, Pengawas, Pedagang
		3) Penindaklanjutan laporan masalah dan ketidakpatuhan	Pemerintah, Pengawas, Pedagang
	Sistem klarifikasi kepercayaan	1) Ketersediaan administrasi bagi pedagang yang bergabung dengan program	Pemerintah, Pengawas, Pedagang

Sumber: (Chen, 2019; Lupia, 2015)

Berdasarkan indikator-indikator tersebut, maka disusunlah butir wawancara sebagai berikut.

Tabel 3. Pemerintah & Pengawas

No	Pertanyaan	Jawaban
A1	Apa itu program "Warung Tekan Inflasi" dan bagaimana tujuan utamanya dalam mengatasi masalah inflasi?	
A2	Apakah terdapat persyaratan tertentu bagi pedagang untuk bergabung dengan program Warung Tekan Inflasi?	
A3	Menurut Anda, apa saja peran pedagang dalam program Warung Tekan Inflasi?	
A4	Menurut Anda, apa saja kepentingan pedagang yang bergabung dengan program Warung Tekan Inflasi?	
A5	Menurut Anda, apakah terdapat kepentingan yang membuat pedagang menyalahi aturan dalam program Warung Tekan Inflasi?	
A6	Menurut Anda, apa saja kecurangan yang dapat dilakukan oleh pedagang untuk dapat mendapatkan keuntungan?	
A7	Bagaimana pemerintah mengatasi perbedaan kepentingan antara pemerintah dan pedagang?	
A8	Bagaimana risiko agensi dapat muncul dalam program "Warung Tekan Inflasi", dan bagaimana risiko ini dapat mempengaruhi efisiensi program?	
A9	Bagaimana cara pemerintah untuk mengatasi risiko tersebut?	
A10	Apakah terdapat kompensasi bagi pedagang yang berhasil melakukan penjualan dalam jumlah tertentu?	
A11	Bagaimana pandangan Anda mengenai kepemimpinan pemerintah Kota, khususnya dalam mengatur mengenai program Warung Tekan Inflasi?	
A12	Apakah program "Warung Tekan Inflasi" memberikan insentif atau dukungan khusus bagi pelaku usaha lokal untuk mendorong kerjasama dan integrasi vertikal?	
A13	Apakah program Warung Tekan Inflasi memberikan insentif atau penghargaan bagi whistleblower yang mengungkapkan informasi yang penting atau berharga?	
A14	Apakah ada bentuk insentif atau manfaat lain yang diberikan kepada pedagang untuk mendorong partisipasi dan kerjasama dalam program Warung Tekan Inflasi?	

No	Pertanyaan	Jawaban
A15	Bagaimana evaluasi kinerja dan dampak program "Warung Tekan Inflasi" dilakukan untuk memastikan bahwa risiko agensi dapat diminimalkan dan manfaat program dapat tercapai?	

No	Pertanyaan	Jawaban
B1	Apakah terdapat regulasi yang dapat mengatur mengenai sanksi bagi pedagang yang melakukan kecurangan (misalnya menjual diluar harga yang ditentukan, dst.)?	
B2	Jika ada, bagaimana penegakan aturan tersebut?	
B3	Apakah Anda merasa pengawasan dari program Warung Tekan Inflasi cukup ketat? Mengapa?	
B4	Apakah ada ketentuan yang jelas dalam program Warung Tekan Inflasi mengenai pelaporan masalah atau ketidakpatuhan, serta prosedur untuk mengajukan whistleblowing?	
B5	Bagaimana program Warung Tekan Inflasi merespons whistleblowing? Apakah ada langkah-langkah untuk menyelidiki dan menindaklanjuti laporan whistleblower dengan cepat dan adil?	
B6	Bagaimana transparansi dan akuntabilitas diterapkan dalam program "Warung Tekan Inflasi" untuk mengurangi risiko agensi dan meningkatkan kepercayaan antara pemerintah dan pedagang?	
B6	Apakah terdapat pinalti administratif bagi pedagang yang ditemukan melakukan kecurangan?	
B7	Apakah terdapat izin administratif bagi pedagang yang bergabung dengan program Warung Tekan Inflasi?	
B8	Apakah terdapat koleksi administratif bagi pedagang yang bergabung dengan program Warung Tekan Inflasi?	
B9	Apakah terdapat tindakan wajib administratif bagi pedagang yang bergabung dengan program Warung Tekan Inflasi?	
B10	Menurut Anda, regulasi apa yang dibutuhkan untuk mengatasi agency loss yang terjadi pada program Warung Tekan Inflasi?	

Tabel 4. Pedagang

No	Pertanyaan	Jawaban
A1	Apa itu program "Warung Tekan Inflasi" dan bagaimana tujuan utamanya dalam mengatasi masalah inflasi?	
A2	Apakah terdapat persyaratan tertentu bagi pedagang untuk bergabung dengan program Warung Tekan Inflasi?	
A3	Menurut Anda, apa saja peran pedagang dalam program Warung Tekan Inflasi?	
A4	Apakah terdapat perubahan bagi toko Anda sebelum dan sesudah Anda bergabung dengan program Warung Tekan Inflasi?	
A5	Apa saja perubahan yang Anda rasakan setelah bergabung dengan program Warung Tekan Inflasi?	
A6	Bagaimana pandangan Anda mengenai peran Anda sebagai pedagang dalam program Warung Tekan Inflasi?	
A7	(Identifikasi kepentingan) Apa tujuan Anda bergabung dengan program Warung Tekan Inflasi?	
A8	Apakah tujuan tersebut telah tercapai? a. Jika sudah, bagaimana cara Anda mencapai hal tersebut?	

No	Pertanyaan	Jawaban
	b. Jika belum, bagaimana rencana Anda untuk mencapai hal tersebut?	
A9	Menurut Anda, apakah penjualan toko Anda saat ini sesuai dengan harapan Anda?	
A10	Apakah rencana Anda untuk toko Anda kedepannya? (misal membuka cabang, meningkatkan penjualan, dll)	
A11	Bagaimana pandangan Anda mengenai kepemimpinan pemerintah Kota, khususnya dalam mengatur mengenai program Warung Tekan Inflasi?	
A12	Apakah Anda pernah mengalami konflik dengan pihak pemerintah terkait dengan program Warung Tekan Inflasi ini?	
A13	Apakah Anda pernah mengalami ketidaknyamanan akibat perubahan regulasi atau standar prosedur dalam program Warung Tekan Inflasi?	
A14	Apakah Anda merasa pengawasan dari program Warung Tekan Inflasi tidak cukup, cukup ketat, atau terlalu ketat? Mengapa?	
A15	Apa saja insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada pedagang yang bergabung dalam program Warung Tekan Inflasi?	
A16	Apa keuntungan terbesar dari penjualan Anda?	
A17	Apakah Anda mendapatkan keuntungan lebih jika tidak mengikuti aturan program Warung Tekan Inflasi, baik dalam menentukan harga jual, dll?	
A18	Menurut Anda, apakah Anda bisa mendapatkan keuntungan diluar insentif yang diberikan oleh pemerintah?	
A19	Apakah memungkinkan bagi Anda untuk menjual dengan harga yang berbeda dengan yang sudah ditentukan?	
A20	Apakah terdapat kompensasi bagi pedagang yang berhasil melakukan penjualan dalam jumlah tertentu?	
B1	Apakah terdapat peraturan yang meregulasi apabila terjadi tindakan curang dari pedagang?	
B2	Apakah terdapat regulasi yang dapat mengatur mengenai sanksi bagi pedagang yang melakukan kecurangan (misalnya menjual diluar harga yang ditentukan, dst.)?	
B3	Jika ada, bagaimana penegakan aturan tersebut?	
B4	Apakah Anda merasa pengawasan dari program Warung Tekan Inflasi cukup ketat? Mengapa?	
B5	Apakah terdapat pinalti administratif bagi pedagang yang ditemukan melakukan kecurangan?	
B6	Apakah terdapat izin administratif bagi pedagang yang bergabung dengan program Warung Tekan Inflasi?	
B7	Apakah terdapat koleksi administratif bagi pedagang yang bergabung dengan program Warung Tekan Inflasi?	
B8	Apakah terdapat tindakan wajib administratif bagi pedagang yang bergabung dengan program Warung Tekan Inflasi?	

Validitas Data

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi untuk memastikan validitas data. Selain narasumber wawancara, peneliti juga mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, termasuk pengawas dan masyarakat yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan program Warung Tekan Inflasi. Informan yang terlibat meliputi pemerintah, pedagang, pengawas, dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan mengumpulkan informasi dari keempat kelompok informan ini, penelitian dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang

implementasi program Warung Tekan Inflasi. Triangulasi sumber ini diharapkan dapat meningkatkan validitas data dan memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang potensi patologis serta langkah-langkah mitigasi yang dapat diambil dalam program tersebut. Kriteria validitas data secara detail dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2. Kriteria Validitas Data

Item	Pihak yang Dianalisis	Indikator Validitas
Tujuan dan preferensi pedagang dalam bergabung dengan program	Pemerintah, Pengawas, Pedagang	Tujuan pedagang yang diharapkan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama yang ditanda tangani oleh Dinas Perdagangan dan Pedagang ketika bergabung dengan Program Warung Tekan Inflasi
Informasi dan asimetri informasi antara pemerintah dan pedagang dalam pelaksanaan program	Pemerintah, Pedagang, Masyarakat	Laporan Penjualan yang ditanda tangani oleh pihak terkait sebagai penanggung jawab laporan
Pengawasan bagi pedagang dalam program	Pemerintah, Pengawas, Pedagang	Laporan tim pengawas yang ditanda tangani sebagai penanggung jawab laporan
Struktur insentif bagi pedagang	Pemerintah, Pengawas, Pedagang	Berita Acara Penjualan
Ketersediaan dan penegakan regulasi yang mengatur mengenai sanksi kecurangan.	Pemerintah, Pengawas, Pedagang	Peraturan Walikota Nomor 50 tahun 2022 dan Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2023
Prosedur pelaporan masalah atau ketidakpatuhan	Pemerintah, Pengawas, Pedagang	Laporan tim pengawas yang ditanda tangani sebagai penanggung jawab laporan
Respon terhadap *whistle-blowing*	Pemerintah, Pengawas, Pedagang	Persepsi mengenai pengetahuan dan pengalaman terkait whistle-blowing pada Program Warung Tekan Inflasi
Penindaklanjutan laporan masalah dan ketidakpatuhan	Pemerintah, Pengawas, Pedagang	Laporan Monitoring dan evaluasi
Ketersediaan administrasi bagi pedagang yang bergabung dengan program	Pemerintah, Pengawas, Pedagang	Laporan Keuangan Dinas Perdagangan

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data mengikuti pendekatan yang diuraikan oleh Miles dan Huberman (2014). Pendekatan ini melibatkan empat tahap utama, yakni pengumpulan data, kondensasi data, penarikan kesimpulan/verifikasi, dan penyajian data. Pemilihan teknik analisis data ini disebabkan karena pendekatan tersebut memberikan kerangka kerja yang fleksibel dan adaptif untuk menganalisis data kualitatif, sesuai dengan kebutuhan penelitian ini sebagai studi kasus kualitatif. Analisis data dilakukan menggunakan aplikasi Nvivo dengan penerapan manual coding berdasarkan proses analisis interaktif (Miles & Huberman, 2014).

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Warung Tekan Inflasi di Kota Madiun

Program Warung Tekan Inflasi (Wartek) adalah inisiatif Pemerintah Kota Madiun untuk mengimplementasikan kebijakan subsidi kepada masyarakat yang terdampak inflasi. Program ini memiliki tujuan baik dalam jangka 222ocal222a maupun jangka pendek. Secara jangka panjang, Wartek bertindak sebagai model bagi daerah lain dalam memangkas rantai distribusi, memudahkan akses masyarakat terhadap barang pokok dengan harga terjangkau, serta menerapkan kebijakan yang tepat sasaran untuk mencegah penimbunan barang. Sedangkan dalam jangka pendek, program ini diharapkan dapat meredam tingkat inflasi bulanan di Kota Madiun. Secara praktis, Wartek melibatkan pendirian beberapa pasar yang menyediakan barang kebutuhan pokok dan konsumsi utama masyarakatmelalui kerjasama antara pemerintah Kota Madiun dan pedagang. Pemerintah memberikan subsidi untuk mendukung distribusi barang tersebut, sehingga harga jualnya lebih terjangkau tanpa mengorbankan kualitas. Barang-barang yang mendapat subsidi meliputi beras, gula, minyak, telur, bawang putih dan merah, serta cabai rawit, baik di pasar tradisional maupun di pasar kewilayahan, dari produsen, Bulog, dan distributor lokal.

Hasil Wawancara

Pada penelitian ini, pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang sesuai dengan Program Warung Tekan Inflasi. Hasil wawancara kepada beberapa informan adalah sebagai berikut.

Tabel 5. Hasil wawancara

Kode data	Jawaban pemerintah 1	Jawaban pemerintah 2
1.A .1	Dukungan baik dengan BUMD	Koordinasi sangat baik
1.A. 2	Pengawasan memaksimalkan tenaga lain	
1.A.3	Untuk mendapatkan kecukupan ikut mendukung program pemerintah	Bermanfaat meningkatkan pendapatan
1.B.1		Ada SOP
1.B.2		Ada di regulasi dan juknis
1.B.3		• Siopa, Sioma supaya tidak terjadi pembelian berulang • Sisi timbangan yang kadang kurang pas
1.B.4		Rekap penjualan tenaga pengaman, rekap deverbal, dan mengajukan diverbal
1.C.1	Antusiasme Masyarakat tinggi sehingga masih relevan untuk dilanjutkan	Relevan
1.C.2	Cukup Efisien	
1.D.1		• Harus penjual sembako • Mengisi fakta integritas • TTD PKS
		27 keluruhan, faktor usia ada yang gagal
2.A.2		Sudah cukup
2.B.1		Pengaduan terbuka pada Kominfo
		Penyedia menjual beras dengan kondisi tidak bagus langsung ditukar
2.1.D	Pihak pemerintah/pedagang optimalisasi aplikasi siap responsive	Respon baik

Tabel 6. Hasil Wawancara Pedagang

Kode	Pedagang 1	Pedagang 2	Pedagang 3	Pedagang 4
1.A.1	Kondisi terkait inflasi di Kota Madiun kemudian diminta menyediakan barang rutin koordinasi	Menurut saya pendistribusian tidak ada kendala	Sudah baik	Baik
1.B.2	Ada perjanjian kontrak kerjasama	Ada perjanjian kontrak	Tidak ada	Adanya perjanjian jual beli
1.B.4	Subsidi ongkos dan subsidi harga harus administrasi lengkap	Kendala pencairan dana yang molor	Fotocopy KTP	Di data taka da maksimal batas
1.C.1	Secara pandangan kami masih relevan karena masih mencukupi kebutuhan konsumen	Terus berlanjut	Relevan	Dilanjutkan asalkan kita diberi keuntungan yang memadai

Tabel 7. Hasil wawancara pengawas

Kode	Pengawas 1	Pengawas 2	Pengawas 3	Pengawas 4	Pengawas 5	Pengawas 6
1.B.1	Bagus untuk pemerintah	Antri dan membawa KTP	Disiplin, KTP harus	Mengumpulkan FC KTP, antri	Membeli dengan membawa FC KTP	Bawa KTP inpus petugas
1.A.4	Kurang lebih 5 jam 1 toko	3-4 jam tergantung toko	Sekitar 4 jam	Antara 3-4 jam 1 toko	3 jam 1 kios	Sekitar 3-4 jam 1 kios
1.B.3	Pembelian berkali-kali dan antri yang rusuh	Pembeli berpindah tempat	Tertib	Pembeli fotokopi banyak untuk dirinya	Pembeli yang beberapa kali dan KTP yang berbeda	1 orang banyak KTP
1.A.5	Biar cepet habis	Untuk dijual lagi karena ada potensi kenal	-	Membantu saudaranya karena ada rasa iba	Untuk mendapatkan keuntungan lebih	Kadang kurang kontrak
1.C.1	Kalua menurut saya relevan	Masih relevan tergantung inflasi	Tetep dilanjutkan karena sembako semakin mahal	Perlu dilanjutkan karena sembako naik	Masih perlu dilanjutkan	Masih perlu dijalankan dan sangat membantu
2.B.3	Lebih turun ke lapangan	Memperketat seleksi, tingkatkan evaluasi	-	Petugas harus tegas	Diperketat pengawasannya	System dikaji ulang supaya tepat sasaran
2.D.2	Masih perlu ditingkatkan dan evaluasi disempurnakan	Masih kurang, perlu diperbaiki, terutama tata cara pembelian	Baik	Sudah cukup baik	Cukup baik	

Analisis Program Warung Tekan Inflasi

Peneliti melakukan analisis terhadap Program Wartek dengan melakukan wawancara terhadap tiga kelompok stakeholder yang terlibat, yaitu masyarakat, pedagang, dan pemerintah. Pendekatan ini diharapkan memberikan gambaran komprehensif tentang implementasi program oleh pemerintah dan pedagang, serta manfaat yang dirasakan oleh pengguna. Hasil wawancara dengan ketiga pihak tersebut kemudian dipetakan sebagai berikut (Gambar 7).

Hasil analisis program Wartek dikategorikan ke dalam tiga aspek utama: otoritas, keadilan, dan efisiensi. Program ini dilaksanakan dan diawasi oleh pemerintah, yang bertindak sebagai inisiator utama. Fokus utama pelaksanaan Program Wartek adalah pada barang-barang yang mendapat subsidi. Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan sistem pelaksanaan yang dapat mencegah tindakan kecurangan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi dari pengadaan barang sembako dengan harga murah. Dalam hal ini, peran pemerintah sebagai pengawas Program Wartek sangat penting. Program Wartek juga menunjukkan keadilan dalam pelaksanaannya, karena memberikan manfaat bagi pemerintah, pedagang, dan masyarakat. Bagi pemerintah, program ini membantu mengendalikan inflasi di daerah tersebut. Subsidi yang diberikan oleh Pemerintah Kota Madiun memungkinkan harga sembako tetap terjangkau di pasar tradisional, yang membantu menjaga stabilitas harga dan mencegah kenaikan yang signifikan.

Bagi pedagang, program ini juga memberikan keuntungan, karena meskipun mereka menjual barang dengan harga yang lebih rendah, mereka masih mendapatkan keuntungan penuh. Hal ini juga menciptakan persaingan sehat di antara pedagang, dengan masyarakat lebih memilih untuk berbelanja di toko-toko yang berpartisipasi dalam Program Wartek karena harga yang lebih murah. Bagi masyarakat, Program Wartek memberikan manfaat yang signifikan dalam beberapa aspek. Pertama, program ini menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau, mengurangi beban anggaran keluarga. Ini juga membantu dalam manajemen anggaran yang lebih efisien, memungkinkan mereka untuk mengalokasikan uang untuk kebutuhan lainnya seperti pendidikan, kesehatan, atau tabungan. Harga yang terjangkau juga meningkatkan daya beli

masyarakat, memberikan kesempatan kepada yang berpenghasilan rendah untuk membeli lebih banyak barang atau makanan bergizi. Subsidi ini juga berperan dalam mencegah kemiskinan, membantu mengurangi risiko kemiskinan atau kesulitan finansial akibat kenaikan harga barang pokok. Selain itu, stabilitas harga juga menjaga stabilitas sosial, membuat masyarakat merasa lebih aman dan terjamin atas kebutuhan pokok mereka.

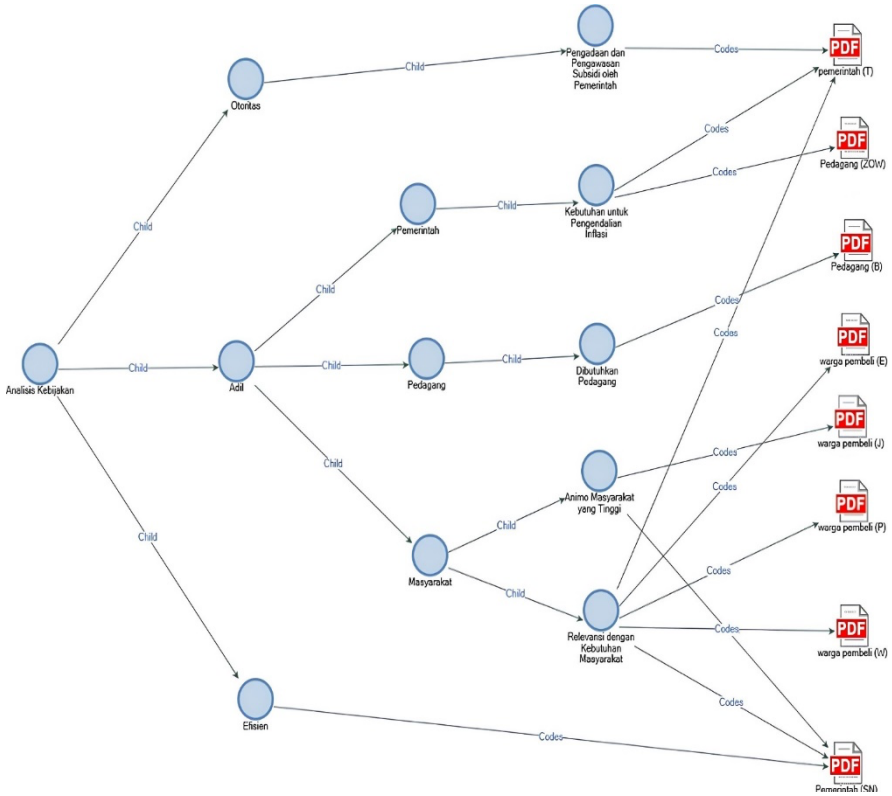

Gambar 1. Hasil *Mapping* Analisis Program Wartek dengan Nvivo
Sumber: Data diolah peneliti, 2023

Program Wartek terbukti efisien dalam pelaksanaannya, terutama dalam mencapai tujuan dan memberikan manfaat bagi pedagang dan masyarakat Kota Madiun. Kerjasama antara pemerintah dan pedagang berhasil menjaga harga barang tetap terjangkau bagi masyarakat. Subsidi yang diberikan juga berhasil meningkatkan daya beli dan mengurangi risiko kemiskinan di kalangan berpenghasilan rendah. Respon positif dari masyarakat terhadap ketersediaan barang pokok yang terjamin dan suasana yang lebih aman mencerminkan keberhasilan program ini dalam menjaga stabilitas sosial. Dari segi analisis kebijakan, baik pemerintah, pedagang, maupun masyarakat memberikan dukungan untuk keberlanjutan Program Wartek. Pemerintah sebagai inisiator utama dan pengawas program ini telah berhasil memastikan sistem pelaksanaan yang adil dan efisien serta mencegah tindakan kecurangan yang merugikan pihak-pihak tertentu. Program ini tidak hanya memberikan manfaat bagi pemerintah dengan mengendalikan inflasi, namun juga memberikan peluang bagi pedagang untuk menarik konsumen dengan menawarkan harga subsidi yang lebih rendah. Bagi masyarakat, program ini memberikan manfaat signifikan dalam menjamin ketersediaan barang pokok dengan harga terjangkau, meningkatkan efisiensi pengeluaran, daya beli, serta mencegah risiko kemiskinan. Dengan respon positif dari masyarakat, program ini terbukti berhasil dalam mencapai tujuannya, menjaga stabilitas sosial, dan memberikan manfaat yang nyata bagi semua pihak yang terlibat.

Identifikasi Potensi Patologis pada Implementasi Program Warung Tekan Inflasi di Kota Madiun

Program Wartek telah berjalan sejak 1 Juli 2022 hingga sekarang. Harga barang sembako yang terjangkau memberikan manfaat bagi pemerintah, pedagang, dan masyarakat Kota Madiun. Meskipun setiap pihak mendukung keberlanjutan Program Wartek, penting untuk mengkaji program ini dari berbagai sudut pandang agar tidak merugikan masyarakat sebagai penerima subsidi. Ketika terjadi perbedaan kepentingan antara pemerintah dan pedagang dalam Program Wartek, hal ini dapat menciptakan potensi masalah yang lebih kompleks. Penelitian yang dilakukan mendapatkan hasil bahwa pemerintah dan pedagang memiliki kerja sama yang baik, tetapi terdapat beberapa hambatan komunikasi dalam pelaksanaan Program Wartek. Salah satu masalah utama adalah keterlambatan dalam penyaluran dana subsidi kepada pedagang oleh pemerintah.

Proses birokrasi yang rumit atau lambat sering menghambat pedagang untuk mendapatkan dana subsidi tepat waktu, menyebabkan ketidakpuasan di pihak pedagang yang membutuhkan bantuan finansial tersebut

untuk menjalankan usaha mereka. Selain itu, pedagang yang berpartisipasi dalam Program Wartek cenderung fokus pada maksimalisasi keuntungan. Jika subsidi yang diberikan oleh pemerintah terlalu kecil atau mengalami keterlambatan, para pedagang mungkin terdorong untuk menaikkan harga barang sembako di luar kendali, bertentangan dengan tujuan program untuk menjaga harga tetap terjangkau. Selain itu, dalam upaya mencapai keuntungan yang lebih besar, pedagang mungkin cenderung melakukan praktik curang, seperti memanfaatkan celah dalam penyaluran subsidi untuk keuntungan pribadi atau melakukan manipulasi harga secara tidak adil. Adapun temuan peneliti dari wawancara dengan pemerintah dan masyarakat, yang diilustrasikan dalam pemetaan berikut.

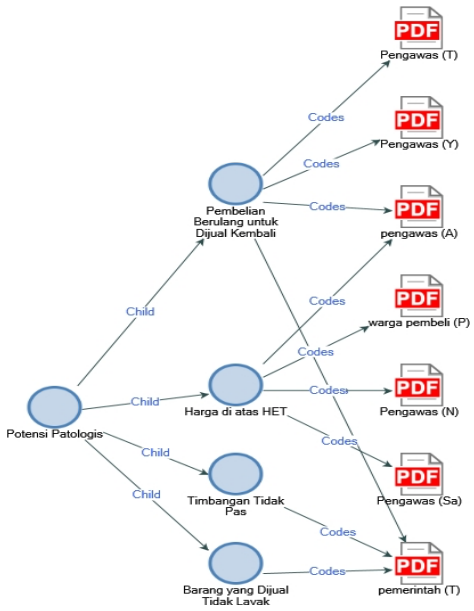

Gambar 2. Hasil *Mapping* Potensi Patologis oleh Pedagang dalam Program Wartek dengan Nvivo
Sumber: Data diolah peneliti, 2023

Peneliti menemukan adanya potensi patologis yang tidak etis atau berpotensi dari sebagian pedagang. Salah satu kecenderungan patologis yang teridentifikasi adalah penjualan barang di atas harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pedagang menjual barang dengan harga yang melebihi batas yang seharusnya ditetapkan, menciptakan ketidaksesuaian dengan ketentuan yang telah ditetapkan untuk menjaga harga tetap terjangkau bagi masyarakat. Hal ini mungkin disebabkan oleh pedagang yang hanya bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan mereka dengan menaikkan harga barang sembako, terutama jika mereka melihat adanya peluang untuk mendapatkan keuntungan tambahan dari situasi pasar yang tidak diatur secara ketat. Selain itu, situasi persediaan barang yang terbatas atau sulit didapat juga bisa menjadi pemicu. Jika barang sembako yang ditawarkan langka atau sulit ditemukan, pedagang mungkin menaikkan harga untuk memanfaatkan keterbatasan pasokan tersebut dan mendorong permintaan, meskipun hal ini bertentangan dengan tujuan program untuk menjaga harga tetap terjangkau.

Peneliti juga menemukan kecenderungan adanya pembelian berulang oleh pedagang dengan tujuan untuk dijual kembali. Praktik ini berpotensi menimbulkan kenaikan harga dan kelangkaan barang di pasar, yang pada akhirnya dapat merugikan konsumen dengan harga yang tidak wajar dan kesulitan mendapatkan barang sembako. Potensi patologis lainnya adalah ketidaksesuaian dalam penggunaan timbangan oleh beberapa pedagang. Timbangan yang tidak akurat dapat menghasilkan pengukuran yang tidak tepat untuk jumlah barang yang dibeli oleh konsumen, yang berpotensi merugikan mereka dengan pengukuran yang tidak sesuai dengan harga yang seharusnya. Peneliti juga menemukan bahwa beberapa pedagang menjual barang yang tidak layak, yang berarti barang tersebut tidak memenuhi standar kualitas atau kondisi yang sesuai untuk dikonsumsi. Praktik ini sangat merugikan bagi konsumen, mengancam kesehatan mereka, dan secara signifikan melanggar tujuan dari Program Wartek untuk menyediakan barang-barang sembako yang layak dengan harga terjangkau.

Mitigasi Potensi Patologis pada Implementasi Program Warung Tekan Inflasi di Kota Madiun

Pemerintah telah mengimplementasikan upaya mitigasi terhadap potensi patologis yang terdiri dari tiga komponen utama untuk memastikan keberlanjutan Program Wartek, yaitu dukungan hukum, penunjukan subjek yang dapat dipercaya, dan penerapan sistem klarifikasi kepercayaan. Hal ini tercermin dalam hasil pemetaan berikut.

Gambar 3. Hasil *Mapping* Mitigasi Pemerintah Terhadap Potensi Patologis dalam Program Wartek dengan Nvivo

Sumber: Data diolah peneliti, 2023

Pemerintah kota telah mengambil langkah konkret untuk memastikan keteraturan Program Wartek melalui dukungan hukum yang kuat. Pertama, langkah tersebut melibatkan penerbitan peraturan resmi oleh walikota, yang menjadi panduan utama dalam pelaksanaan program. Aturan ini mencakup penetapan harga eceran tertinggi (HET) untuk barang sembako, ketentuan jual-beli yang harus dipatuhi pedagang, serta panduan distribusi barang dan mekanisme penyaluran subsidi. Selain peraturan resmi tersebut, terdapat juga perjanjian kontrak antara pemerintah dan pedagang. Kontrak ini bukan hanya mengikat secara hukum tetapi juga sebagai komitmen tertulis dari kedua belah pihak. Dalam kontrak ini, tercantum kewajiban pedagang untuk menjual barang dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah, menjamin ketersediaan barang, serta mematuhi segala peraturan yang telah disepakati. Hal ini memberikan kerangka kerja yang jelas bagi pemerintah dalam menjalankan program secara efektif dan adil.

Pemerintah telah merancang strategi untuk mengurangi potensi patologi dengan menetapkan subjek yang dapat dipercaya dalam Program Wartek. Salah satu langkahnya adalah dengan menugaskan tenaga pengawas yang bertanggung jawab untuk memantau kegiatan setiap pedagang. Tenaga pengawas ini berperan dalam mengawasi pelaksanaan program, memeriksa kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan, dan memastikan bahwa pedagang menjalankan praktik jual-beli sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain tenaga pengawas, pemerintah juga menyediakan sistem pengaduan melalui aplikasi Sistem Informasi Operasi Pasar Kota Madiun (SI OPA OMA). Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat memberikan informasi atau melaporkan pelanggaran terkait Program Wartek secara langsung. Meskipun demikian, masih ada kendala dalam praktiknya, seperti antarmuka aplikasi yang kurang ramah pengguna dan kurangnya pengetahuan tentang keberadaan aplikasi ini, yang mengurangi efektivitas sistem pengawasan yang telah diterapkan.

Pemerintah juga menerapkan sistem klarifikasi kepercayaan untuk mengurangi potensi patologi dalam Program Wartek. Langkah-langkah ini termasuk persyaratan wajib bagi pedagang untuk terdaftar secara resmi di Dinas Perdagangan. Tujuan dari registrasi ini adalah untuk memastikan bahwa hanya pedagang yang telah melewati proses verifikasi yang berhak menerima subsidi sembako. Selain itu, terdapat pembatasan jumlah pembelian barang sembako bagi pedagang tertentu untuk mengontrol distribusi barang dan mencegah akumulasi yang berlebihan yang dapat mengarah pada praktik spekulasi. Pemerintah juga memberikan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan petunjuk teknis yang rinci bagi pedagang sebagai panduan operasional yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pencairan dana subsidi hanya akan diizinkan setelah pedagang lulus

evaluasi rekapitulasi penjualan yang ketat, menunjukkan bahwa dana subsidi hanya akan diberikan kepada pedagang yang dapat membuktikan keterlibatannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Langkah-langkah ini diterapkan untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dalam Program Wartek, sekaligus mengurangi kemungkinan terjadinya praktik tidak sesuai atau patologis yang dapat merugikan program.

***Agency Loss* akibat Potensi Patologis pada Implementasi Program Warung Tekan Inflasi di Kota Madiun**

Agency loss terjadi ketika terdapat perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen (Lupia, 2015). Berdasarkan konsep ini, penelitian menganalisis kepentingan yang berbeda antara pemerintah dan pedagang dalam Program Wartek. Tujuan utama pemerintah dalam program ini adalah menjaga ketersediaan dan harga terjangkau untuk barang kebutuhan pokok dalam rangka menekan inflasi daerah, sesuai dengan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Subsidi Barang Kebutuhan Pokok. Dalam hasil wawancara lapangan, peneliti menemukan dua jenis kepentingan yang dimiliki oleh pedagang: yang mendukung program pemerintah dan yang hanya mengincar keuntungan. Pedagang yang mendukung program pemerintah cenderung mengutamakan kepuasan konsumen, volume penjualan, dan keuntungan kompetitif dari menawarkan harga jual yang murah, yang sejalan dengan tujuan pemerintah.

Namun, pedagang yang hanya fokus pada keuntungan mungkin melihat program ini sebagai peluang untuk mendapatkan profit tambahan tanpa memperhatikan manfaat dari menjual barang dengan harga lebih terjangkau. Meskipun subsidi harga sembako dapat memberikan keuntungan kepada pedagang, sebagian dari mereka mungkin belum menyadari dampak positif yang bisa mereka peroleh dengan menjual barang dengan harga lebih murah. Beberapa pedagang bahkan mungkin masih mempertimbangkan untuk menjual di atas HET dan melakukan kecurangan. Penelitian juga menemukan beberapa potensi patologis, seperti penjualan barang sembako subsidi dengan harga di atas HET, penggunaan timbangan yang tidak akurat, penjualan barang tidak layak, dan pembelian berulang untuk dijual kembali. Penjualan barang sembako subsidi dengan harga di atas HET, misalnya, terjadi karena pedagang hanya memikirkan peningkatan keuntungan mereka sendiri, yang bertentangan dengan tujuan program subsidi sembako.

Timbangan yang tidak akurat juga merugikan masyarakat karena mereka harus membayar lebih dari seharusnya untuk barang yang dibeli, mengurangi kepercayaan pada program dan pemerintah. Barang tidak layak yang dijual juga merupakan bentuk agency loss yang dapat merugikan masyarakat, menandakan oversupply atau distribusi barang yang tidak layak kepada pedagang. Potensi patologis yang juga ditemukan adalah pembelian berulang untuk dijual kembali. Hal ini merupakan agency loss yang muncul dari sisi pembeli yang juga perlu untuk diperhatikan. Subsidi sembako atau barang kebutuhan pokok diberikan oleh pemerintah atau lembaga tertentu dengan tujuan untuk membantu mereka yang membutuhkan bantuan tersebut, seperti keluarga dengan pendapatan rendah atau orang-orang yang kurang mampu secara finansial. Ketika seseorang menggunakan berbagai KTP untuk mendapatkan subsidi dalam jumlah besar demi dijual kembali, itu merugikan sistem dan mengurangi kesempatan bagi orang-orang yang sebenarnya membutuhkan bantuan tersebut.

Penanganan Potensi Patologis oleh Pemerintah pada Implementasi Program Warung Tekan Inflasi di Kota Madiun

Penanganan potensi patologis bertujuan utama untuk mengurangi kemungkinan terjadinya agency loss. Potensi patologis di sini merujuk pada tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pedagang dengan tujuan memperoleh keuntungan lebih besar, yang pada akhirnya dapat merugikan konsumen dan mengancam integritas Program Wartek. Jika pedagang terlibat dalam tindakan yang tidak etis atau manipulasi harga, ini bisa berdampak buruk secara luas, mengurangi kepercayaan pada program, dan mengganggu pencapaian tujuan keseluruhan program untuk menjaga stabilitas harga sembako yang terjangkau bagi masyarakat. Oleh karena itu, perbedaan kepentingan yang saling bertentangan antara pemerintah dan pedagang dapat menjadi sumber potensi masalah yang serius dalam pelaksanaan Program Wartek. Ada tiga langkah yang dapat diambil untuk mencegah terjadinya agency loss, yaitu dengan mengedepankan dukungan hukum, menempatkan subjek yang dapat dipercaya, dan menerapkan sistem klarifikasi kepercayaan (Chen, 2019). Peneliti menganalisis upaya mitigasi terhadap potensi patologis berdasarkan tiga aspek tersebut.

Pemerintah kota telah mengambil langkah konkret untuk menjaga keteraturan Program Wartek dengan dukungan hukum yang kuat. Langkah pertama adalah menerbitkan peraturan resmi oleh walikota sebagai panduan utama pelaksanaan program. Aturan ini mencakup penetapan harga eceran tertinggi (HET) untuk sembako, ketentuan jual-beli pedagang, dan panduan distribusi barang serta mekanisme subsidi. Selain aturan resmi, terdapat perjanjian kontrak antara pemerintah dan pedagang. Kontrak ini bukan hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga merupakan komitmen tertulis. Di sini, pedagang menyetujui penjualan dengan harga yang ditetapkan pemerintah, menjamin ketersediaan barang, serta mematuhi aturan yang disepakati, memberikan kerangka kerja yang jelas bagi pemerintah.

Pada kerangka teori prinsipal agen, dukungan hukum memainkan peran yang sangat penting dalam mengatur hubungan antara prinsipal (pemerintah) dan agen (pedagang). (Lane, 2020; Zhou et al., 2021). Dukungan hukum memungkinkan kontrak untuk memasukkan ketentuan-ketentuan yang secara sah mengikat kedua belah pihak (Bocharova & Rymanov, 2022). Hal ini memberikan landasan hukum yang kuat jika terjadi sengketa atau pelanggaran kontrak. Dukungan hukum melindungi kepentingan prinsipal dari kemungkinan kerugian akibat perilaku agen yang tidak sesuai atau dari kejadian di luar kendali yang dapat memengaruhi pelaksanaan kontrak (Maggetti & Papadopoulos, 2018).

Pemerintah merancang strategi untuk mengatasi potensi patologis dengan menunjuk subjek yang dapat dipercaya dalam Program Wartek. Langkah ini melibatkan penempatan tenaga pengawas untuk setiap pedagang yang terdaftar dalam program. Tenaga pengawas bertugas untuk memeriksa kepatuhan pedagang dan memastikan bahwa praktik jual-beli sesuai dengan ketentuan program. Selain itu, pemerintah telah menyediakan situs web Sistem Informasi Operasi Pasar Kota Madiun (SIOPA OMA). Subjek yang dapat dipercaya dalam program Wartek berfungsi sebagai mediator yang menghubungkan prinsipal (pemerintah) dan agen (pedagang), di mana kepentingan keduanya tidak selalu sejalan. (Chen, 2019). Pada teori prinsipal agen, asimetri informasi adalah masalah yang sering terjadi. Subjek yang dipercaya berada dalam posisi untuk mengurangi asimetri ini dengan memberikan informasi yang akurat tentang perilaku agen kepada prinsipal (Zhou et al., 2021).

Pemerintah menerapkan sistem klarifikasi kepercayaan dengan mengharuskan pedagang terdaftar secara resmi di Dinas Perdagangan untuk memenuhi syarat menerima subsidi. Langkah-langkah tambahan meliputi pembatasan jumlah pembelian dan penyediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang rinci bagi pedagang. Pencairan subsidi dilakukan setelah dilakukan evaluasi rekapitulasi penjualan. Dengan sistem klarifikasi kepercayaan ini, dipastikan bahwa hanya pedagang yang telah melewati proses verifikasi yang memadai yang berhak menerima subsidi sembako. Ini memastikan transparansi dalam penyaluran dana subsidi, sehingga hanya pihak yang memenuhi syarat yang dapat menerima subsidi (Chen, 2019; Ye & Deng, 2021).

Penelitian ini menyoroti bahwa kurangnya sistem whistle blowing yang memadai dapat menghambat penegakan Program Warung Tekan Inflasi (Wartek) di Kota Madiun. Sistem whistle blowing yang efektif merupakan mekanisme penting dalam mengidentifikasi dan melaporkan potensi patologi atau pelanggaran yang terkait dengan program subsidi sembako ini. Adanya sistem whistle blowing dapat menjadi pendorong bagi para pelaku usaha atau pedagang untuk patuh terhadap aturan yang telah ditetapkan. Kemungkinan untuk diungkap dan dilaporkan akan menjadi insentif bagi mereka untuk mematuhi ketentuan Program Wartek (Anvari et al., 2019).

Nilai-nilai Kebaruan

Penelitian ini menawarkan beberapa nilai inovatif, di antaranya: (1) Penelitian ini mengungkap potensi patologis dalam Program Wartek sebagai program subsidi yang dikelola oleh pemerintah daerah. Temuan potensi patologis ini dapat memberikan pandangan yang berharga bagi pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas dan efektivitas implementasi Program Wartek. (2) Penggunaan NVivo membawa pemahaman yang lebih menyeluruh dan terpadu tentang fenomena yang sedang diselidiki. Dalam penelitian dengan sumber data yang beragam seperti wawancara, dokumen, atau catatan lapangan, NVivo membantu mengintegrasikan dan menghubungkan data secara kompleks, memperkaya analisis secara keseluruhan.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Salah satunya adalah keterbatasan waktu, yang membatasi peneliti dalam mendalami secara menyeluruh berbagai permasalahan terkait potensi patologis yang diteliti. Sebagai hasilnya, pemahaman mendalam tentang masing-masing potensi patologis menjadi terbatas.

Kesimpulan

Peneliti mengidentifikasi beberapa potensi patologis, seperti penjualan barang sembako subsidi di atas HET, penggunaan timbangan yang tidak akurat, penjualan barang tidak layak, dan pembelian berulang untuk tujuan penjualan kembali. Dalam menanggapi potensi patologis tersebut, Pemerintah Kota Madiun mengambil serangkaian langkah konkret. Mereka menerbitkan peraturan resmi yang mengatur penetapan HET, ketentuan jual-beli, serta panduan distribusi dan subsidi. Selain aturan resmi, terdapat perjanjian kontrak antara pemerintah dan pedagang yang menetapkan komitmen tertulis dan kewajiban pedagang. Pemerintah juga merancang strategi untuk mengurangi patologi, termasuk pengawasan yang lebih ketat terhadap pedagang, sistem pengaduan melalui aplikasi, dan sistem klarifikasi kepercayaan untuk pedagang yang berhak menerima subsidi. Pemerintah juga memberikan batasan jumlah pembelian, SOP yang rinci, dan pencairan subsidi yang terkait dengan evaluasi rekapitulasi penjualan.

Referensi

Ai, Z. (2019). Enterprise's innovation behavior choice under the government subsidy--Analysis based on signaling game. *Ekoloji*, *28*(107), 2369–2376.

Anvari, F., Wenzel, M., Woodyatt, L., & Haslam, S. A. (2019). The social psychology of whistleblowing: An integrated model. *Organizational Psychology Review*, *9*(1), 41–67. https://doi.org/10.1177/2041386619849085

Atalan, A. (2020). Is the lockdown important to prevent the COVID-19 pandemic? Effects on psychology, environment and economy-perspective. *Annals of Medicine and Surgery*, *56*, 38–42. https://doi.org/10.1016/j.amsu.2020.06.010

Bocharova, I., & Rymanov, A. (2022). Principal–agent approach to energy executive compensation design. *Energy Reports*, *8*, 41–47. https://doi.org/10.1016/j.egyr.2022.01.030

Chen, X. (2019). *Principal-agent Theory and Its Application to Administrative Management*. *179*(Ieesasm 2017), 414–417. https://doi.org/10.2991/ieesasm-17.2018.86

Choudhury, N. A., Kim, S., & Ramkumar, M. (2022). Effects of supply chain disruptions due to COVID-19 on shareholder value. *International Journal of Operations & Production Management*, *42*(13), 482–505. https://doi.org/10.1108/IJOPM-03-2022-0173

Dartanto, T. (2013). Reducing fuel subsidies and the implication on fiscal balance and poverty in Indonesia: A simulation analysis. *Energy Policy*, *58*, 117–134. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2013.02.040

Dasgupta, A., & Kapur, D. (2020). The Political Economy of Bureaucratic Overload: Evidence from Rural Development Officials in India. *American Political Science Review*, *114*(4), 1316–1334. https://doi.org/10.1017/S0003055420000477

Fadilla, A. S., & Purnamasari, A. (2021). Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume*, *7*(1), 17–28. https://doi.org/10.35508/jom.v13i3.3311

Hasan, F., Bellenstedt, M. F. R., & Islam, M. R. (2023). Demand and Supply Disruptions During the Covid-19 Crisis on Firm Productivity. *Global Journal of Flexible Systems Management*, *24*(1), 87–105. https://doi.org/10.1007/s40171-022-00324-x

Hennessy, D. A., & Wolf, C. A. (2018). Asymmetric Information, Externalities and Incentives in Animal Disease Prevention and Control. *Journal of Agricultural Economics*, *69*(1), 226–242. https://doi.org/10.1111/1477-9552.12113

Izzati, R. Al, Yusrina, A., & Suryahadi, A. (2023). *Estimating the effect of a fuel price increase on poverty and inequality: Evidence from a fuel subsidy reduction in Indonesia*. *1*, 1–7.

Lane, J.-E. (2020). The Principal–Agent Approach and Public Administration. In *Oxford Research Encyclopedia of Politics*. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.1462

Lupia, A. (2015). Delegation of Power: Agency Theory. In *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences* (pp. 58–60). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.93029-0

Maggetti, M., & Papadopoulos, Y. (2018). The Principal–Agent Framework and Independent Regulatory Agencies. *Political Studies Review*, *16*(3), 172–183. https://doi.org/10.1177/1478929916664359

Masters, N. B., Shih, S.-F., Bukoff, A., Akel, K. B., Kobayashi, L. C., Miller, A. L., Harapan, H., Lu, Y., & Wagner, A. L. (2020). Social distancing in response to the novel coronavirus (COVID-19) in the United States. *PLOS ONE*, *15*(9), e0239025. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0239025

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook* (3th ed.). SAGE Publications Inc.

Pahlevi, R. (2017). Urgensi Bank Indonesia Mengendalikan Inflasi Melalui Sektor Pertanian. *Ekonomi Pembangunan*, 1–14.

Prianto, Y., Marian, M., & Stella, S. (2021). Penyalahgunaan APBD Oleh Para Pejabat Publik Saat Pandemi Covid-19. *Prosiding SENAPENMAS*, 1199. https://doi.org/10.24912/psenapenmas.v0i0.15156

Raghunandan, A. (2022). Government subsidies and corporate Fraud. *Journal of Accounting and Economics*, *74*(1). https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2022.101480

Soen, A. S., Sugianto, H., Theodorus, R., & Mapusari, S. A. (2022). Subsidi di Indonesia. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi)*, *21*(1), 84–92. https://doi.org/10.22225/we.21.1.2022.84-92

Vanani, A. B., & Suselo, D. (2021). Determinasi Resesi Ekonomi Indonesia di Masa Pandemi Covid 19. *Menara Ekonomi*, *7*(2), 1–12. https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2017.07.003

Venny, S., & Asriati, N. (2022). Permintaan Dan Penawaran Dalam Ekonomi Mikro. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JURKAMI)*, *7*(1), 184–194. https://doi.org/10.31932/jpe.v7i1.1583

Widodo, S., & Dahiri, D. (2016). Analisis Pengaruh Belanja Negara Terhadap Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Budget : Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, *1*(1), 39–53.

https://doi.org/10.22212/jbudget.v1i1.16
Ye, F., & Deng, Q. (2021). Strategies for poverty alleviation supply chain with government subsidies and misreporting behavior in China. *PLoS ONE*, *16*(7 July 2021), 1–19. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0253761
Yeremias T. Keban. (2019). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik* (4th ed.). Penerbit Gava Media.
Yolles, M. (2019). Governance through political bureaucracy: an agency approach. *Kybernetes*, *48*(1), 7–34. https://doi.org/10.1108/K-09-2017-0329
Yudiaris, I. G. (2015). Analisis Lingkungan Internal Dan Eksternal Dalam Menghadapi Persaingan Bisnis Pada Cv. Puri Lautan Mutiara. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, *5*(1), 40–64. https://media.neliti.com/media/publications/5363-ID-analisis-lingkungan-internal-dan-eksternal-dalam-menghadapi-persaingan-bisnis-pa.pdf
Yusmiati, Y., Imamulhadi, I., & Sekarwati, S. (2023). Pembinaan Terhadap Pelanggar Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria*, *2*(2), 189–214. https://doi.org/10.23920/litra.v2i2.1266
Zafarullah, H., & Haque, H. (2023). Policies, instrumentalities, compliance and control: combatting money laundering in Bangladesh. *Journal of Money Laundering Control*, *26*(1), 189–204. https://doi.org/10.1108/JMLC-10-2021-0109
Zhang, X., Zhang, S., & Jiao, S. (2018). Game between Government and Developers under the Subsidy Policy of Prefabricated Buildings. *ICCREM 2018*, 153–160.
Zhou, D. K., Sun, A. W., & Zhang, J. Y. (2021). Interpreting Agency Theory Through Greiner Growth Model: Regulatory Mechanism Reduces Agency Costs for Modern Chinese Enterprises. *Proceedings of the 2021 5th International Seminar on Education, Management and Social Sciences (ISEMSS 2021)*, *571*(Isemss), 819–828. https://doi.org/10.2991/assehr.k.210806.156